



Click here and write your Article Category

TENAGA KERJA, NILAI INVESTASI DAN PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM): Bukti Empiris Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Meri Marya¹

¹ Pemerintah Kota Bukittinggi, Indonesia

INFORMASI

Diterima: "24 November 2020"
Disetujui: "01 Desember 2020"
Terbit Daring : "Januari 2021"

KATA KUNCI

industri kecil menengah, tenaga kerja

KORESPONDENSI

Telepon: +62 (0751) 12345678
E-mail: penulis_pertama@afiliasi.xx.xx

A B S T R A C T

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Penciptaan wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu dampak positif yang disumbangkan sektor industri pengolahan dalam perekonomian. Bagian yang cukup banyak berperan dalam perkembangan sektor industri pengolahan ini adalah industri kecil menengah (IKM). IKM di Provinsi Sumatera Barat banyak tersebar pada 19 kabupaten/kota yang bergerak pada berbagai macam jenis produk. IKM juga merupakan jenis usaha yang paling baik dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi di Sumatera Barat. Perkembangan IKM juga cukup baik dapat dilihat dari penambahan jumlah unit usaha, peningkatan jumlah tenaga kerja pada IKM, nilai investasi yang juga semakin meningkat dan nilai produksi juga menunjukkan trend yang positif. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah jumlah tenaga kerja IKM, nilai investasi IKM dan nilai produksi IKM berpengaruh terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel (*time series dan cross section*) di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018. Model yang terpilih pada penelitian ini yaitu model *REM (random effect model)*. Hasil uji dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat dua variabel independet yang signifikan terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM yaitu jumlah tenaga kerja dan nilai produksi IKM. Sedangkan 1 variabel lagi yaitu nilai investasi tidak signifikan terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah unit usaha IKM dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja pada IKM dan nilai produksi yang dihasilkan oleh IKM di kabupaten.kota pada Provinsi Sumatera Barat.

Kode Klasifikasi JEL: I26; J30

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah konsep yang sangat luas dan dipengaruhi berbagai faktor dalam prosesnya serta berbagai kebijakan juga berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Arah dan tujuannya dapat berupa peningkatan status ekonomi masyarakat, perluasan sektor-sektor lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan juga pengaruh perbaikan sosial masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Todaro (2014) bahwa ada banyak aspek pada struktur ekonomi yang akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, selain aspek ekonomi itu sendiri seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, juga mempengaruhi aspek sosial masyarakat.

Salah satu tujuan dari pembangunan di Indonesia, seperti yang terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan konsep dari pembangunan ekonomi itu sendiri, dimana dalam prosesnya akan melibatkan sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan yang ditunjang oleh institusi pemerintahan, sumber daya alam sebagai modal pembangunan dan sumber daya teknologi sebagai penunjang pembangunan dan faktor-faktor lainnya.

Dengan melibatkan semua aspek tersebut pembangunan ekonomi akan dapat mencapai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum baik dari aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari proses kemajuan seperti proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini secara tidak langsung juga menjadi bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki pola kehidupan ke level yang lebih bermutu. Dengan adanya tahapan industrialisasi, pembangunan ekonomi tidak hanya mencapai tujuan fisiknya saja tetapi lebih dari itu yakni meningkatkan level kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Peningkatan level kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik akan merubah struktur perekonomian, sehingga proses perubahan struktur ekonomi ini sering diidentikkan dengan proses industrialisasi. Menurut Tulus T.H Tambunan (2011) sebagai dampak dari proses industrialisasi ini dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang kemudian akan merubah struktur perekonomian, namun dalam proses ini telah melibatkan berbagai peran dari teknologi, spesialisasi produk dan perdagangan antar negara.

Industri dalam ekonomi memiliki berbagai definisi, mikro ekonomi mendefinisikan bahwa menghasilkan produk yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi oleh perusahaan-perusahaan merupakan arti industri. Sedangkan dalam makro ekonomi menjelaskan dengan lebih luas mengenai penciptaan nilai tambah dalam proses industri yang dilihat dari sisi pembentukan pendapatan. Sedangkan Kementerian Perindustrian memberikan definisi bahwa industri merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dalam kegiatannya bertujuan untuk menciptakan barang jadi yang memiliki nilai penggunaan lebih tinggi dengan tahap awalnya melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi. Tetapi dalam definisi ini dikecualikan aktivitas perencanaan fisik dan rekayasa industri.

Perubahan dalam struktur ekonomi pada suatu daerah dapat menggambarkan perubahan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha dalam pembangunan ekonomi.. Perubahan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha ini akan menyerap tenaga kerja dengan tingkat penyerapan yang berbeda Sehingga dapat dilihat potensi masing-masing sektor lapangan usaha dalam struktur ekonomi, sebagai perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meningkatnya kemampuan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang berasal dari usia muda sangat penting untuk menjaga tetap keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Sering kali terjadi ketimpangan pertumbuhan antara penambahan angkatan kerja yang melebihi pembentukan lapangan kerja baru, sehingga meningkatnya angka pengangguran tidak dapat dihindari. Penambahan angka pengangguran ini akan menjadi permasalahan baru dalam perekonomian suatu daerah, yang pengaruh jangka panjangnya akan meningkatkan angka kriminalitas, mengurangi indeks kebahagiaan dan menghambat pembangunan ekonomi itu sendiri. Akibatnya tujuan pembangunan ekonomi tidak akan tercapai.

Tabel dibawah ini dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan kontribusi masing-masing sektor pada PDRB, sebagai berikut:

Tabel 1.1
PDRB Provinsi Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2014-2018 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.151.489,71	33.546.757,19	34.222.561,72	35.387.634,92	36.612.272,53
Pertambangan dan Pengalihan	5.923.565,21	6.144.577,45	6.267.606,76	6.338.267,17	6.705.049,43
Industri Pengolahan	15.140.071,88	15.418.540,17	16.174.096,85	16.540.004,84	16.445.055,91
Pengadaan Listik dan Gas	140.011,69	145.686,13	11.628,93	168.196,58	175.080,06

Sektor	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	133.696,91	141.707,83	150.771,11	156.736,19	160.240,92
Konstruksi	11.523.579,91	12.315.040,24	13.126.836,91	14.075.895,58	15.066.989,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.523.147,03	21.626.609,05	22.796.932,47	24.279.260,45	25.985.871,63
Transportasi dan Pergudangan	14.929.948,87	16.259.293,39	17.506.914,87	18.762.202,18	19.975.310,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.329.396,18	1.420.410,28	1.557.102,43	1.093.494,32	1.832.878,56
Informasi dan Komunikasi	8.322.873,30	9.080.556,08	9.934.334,82	10.802.637,25	11.728.422,78
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.041.345,16	4.188.231,47	4.524.388,29	4.619.805,20	4.665.415,80
Real Estate	2.609.894,33	2.748.095,83	2.895.556,33	3.025.615,61	3.166.853,19
Jasa Perusahaan	585.985,89	620.607,06	651.284,00	685.063,40	722.425,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.511.115,63	7.895.347,42	8.286.949,05	8.659.075,43	9.175.850,47
Jasa Pendidikan	4.657.618,64	5.022.030,09	5.416.448,83	5.954.627,35	6.382.703,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.749.926,04	1.881.299,00	1.984.293,52	2.154.588,55	2.311.450,41
Jasa lainnya	2.067.170,04	2.264.684,32	2.476.536,98	2.673.386,50	2.883.397,98
PDRB	133.340.836,44	140.719.474,19	148.134.243,89	155.976.491,52	163.995.268,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, berbagai publikasi dan edisi

Sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang cukup dominan, hal ini terlihat dari sumbangan yang cukup besar pada PRDB Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata Rp.15.943.553,93 juta rupiah. Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang nomor 3 terbesar, setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada umumnya peningkatan nilai sektor PDRB terjadi pada sektor industri pengolahan selama periode tahun 2014-2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor ekonomi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah sektor industri pengolahan. Industri besar dan sedang serta industri kecil menengah berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB. Sesuai BPS dapat dijelaskan bahwa jenis industri tersebut dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, yaitu: perusahaan yang jumlah tenaganya lebih dari 100 orang merupakan industri besar, perusahaan yang jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang merupakan industri sedang dan perusahaan dengan jumlah tenaga kerjanya 1 sampai 4 orang merupakan industri kecil menengah.

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Unit Usaha IKM, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Jumlah Produksi pada Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018

No.	Indikator Industri Kecil Menengah	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Unit Usaha	18731	21944	28174	35592
2	Jumlah Tenaga Kerja	70181	79030	95315	120060
3	Jumlah Nilai Investasi (Rp.000)	1 163 667 594	1 342 150 760	1 191 637 318	2 965 503 542
4	Jumlah Produksi (Rp.000)	12 512 656 884	14 070 893 293	14 323 800 037	11 224 985 750

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, berbagai publikasi dan Edisi

Usaha atau perusahaan industri kecil menengah di Sumatera Barat pada tahun 2018 tercatat sebesar 35.592 perusahaan dan jumlah tenaga kerja 120.060 orang dengan 44,08% pekerja laki-laki dan 55,92% pekerja perempuan. Dengan klasifikasi industri terbanyak yaitu industri makanan 40.544 usaha, industri pakaian jadi 20.845 usaha dan industri tekstil 17.496 usaha. Tabel diatas juga memperlihatkan fluktuasi

investasi industri kecil menengah dari tahun 2015 sebesar Rp.49.092.117.000,- meningkat menjadi 78.226.350.000,- tahun 2017, namun terjadi penurunan tahun 2018 menjadi Rp.53.438.933.000,-. Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan besar, bagaimana penyerapan tenaga kerja pada IKM yang meningkat ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah investasi. Kondisi yang juga terjadi pada jumlah produksi IKM yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017, kemudian mengalami penurunan tahun 2018 namun nilai investasi meningkat pada tahun tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai investasi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif. Peningkatan jumlah investasi akan diiringi dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk pengembangan industri akan lebih diarahkan pada industri yang padat karya, sehingga dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja dalam proses produksinya.

Tabel 1.3. Perkembangan Jumlah Unit Usaha IKM, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Jumlah Produksi pada Industri Kecil dan Menengah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2018

Kab/Kota	Industri Kecil Menengah							
	Jumlah Unit Usaha		Jml. Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp.000)		Jumlah Produksi (Rp.000)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kepulauan Mentawai	332	384	939	1027	5 199 425	4750525	36 926 114	37415514
Pesisir Selatan	2252	2383	9022	9315	115 767 787	97473476	1 041 792 246	400 330 912
Solok	614	1340	2686	3129	26 983 681	13296570	124 113 652	66 242 320
Sijunjung	999	601	2900	2536	66 445 602	52892404	182 101 328	338 648 685
Tanah Datar	2403	2464	7077	7213	65 284 484	1426909732	630 165 749	3332 240 029
Padang Pariaman	2178	2263	5966	6511	20 596 605	53387081	136 066 689	358 998 975
Agam	4029	4089	10142	10197	42 159 037	43808037	36 626 574	39 132 574
Lima Puluh Kota	565	7180	4404	25218	35 324 030	156085224	217 577 820	374 511 830
Pasaman	1403	1496	4420	4792	36 227 715	37265308	130 512 739	160 360 453
Solok Selatan	580	597	1711	1781	12 237 919	12921459	74 847 732	76 913 572
Dharmasraya	640	681	2041	2199	10 473 057	11057863	87 488 363	91 858 991
Pasaman Barat	1307	1388	3846	4086	34 241 067	36600817	201 450 854	62 692 164
Kota Padang	2177	1800	11229	9314	549 868 981	852035809	10 269 535 143	5135 068 258
Kota Solok	508	562	2397	2562	30 860 086	19754851	142 343 819	80 302 425
Kota Sawahlunto	1245	1316	1775	1861	10 893 904	11243404	16 323 703	19 238 059
Kota Padang Panjang	1077	1096	2044	6069	11 225 898	27109782	178 370 744	42 876 543
Kota Bukittinggi	2461	2496	8690	8803	78 226 350	53438933	579 859 329	466 678 787
Kota Payakumbuh	1757	1781	6000	6069	26 714 282	27109782	139 104 943	42 876 543
Kota Pariaman	1647	1673	8026	7378	12 907 408	28362485	98 592 496	98 598 116
Jumlah	28174	35592	95315	120060	1 191 637 318	2965503542	14 323 800 037	11 224 985 750

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, berbagai publikasi dan Edisi

Tabel diatas memperlihatkan jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada IKM di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat bahwa jumlah industri kecil menengah pada umumnya meningkat pada kab/kota di Sumatera Barat dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 jumlah industri kecil meningkat dari 28.174 unit usaha menjadi 35.592 unit usaha pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil menengah. Pada tabel terlihat terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2015 sebanyak 70.181 orang yang bekerja pada industri kecil menengah menjadi 120.060 orang pada tahun 2018 terjadi pada Provinsi Sumatera Barat secara umum. Tetapi jika dilihat pada masing-masing Kab/Kota terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil menengah. Seperti kondisi yang terjadi pada Kab. Sijunjung pada tahun 2017, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Payakumbuh tahun 2018.

Fenomena ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan karena disatu sisi terjadi peningkatan jumlah unit usaha IKM tetapi disisi lain tenaga kerja yang bekerja pada IKM justru mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 pada beberapa kab/kota di Sumatera Barat. Selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan pertumbuhan investasi dan jumlah produksi industri kecil menengah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat. Secara umum kabupaten/kota di Sumatera Barat terjadi peningkatan nilai investasi dan juga jumlah produksi pada tahun 2017-2018. Namun untuk beberapa kabupaten/kota juga terjadi kondisi yang berbeda, seperti pada Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota Solok,

Rumusan Permasalahan

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, yang diharapkan memiliki dampak positif terhadap tenaga kerja dengan pemanfaatan tenaga kerja lebih tinggi pada sektor ini. Tingginya penyerapan tenaga kerja ini mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan karena dapat membantu mengurangi berbagai masalah pembangunan, seperti pengangguran, pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan perbaikan ekonomi kerakyatan. Terciptanya lapangan kerja baru dengan berkembangnya IKM dapat memberikan stimulasi terhadap peningkatan investasi dan peningkatan jumlah produksi IKM tersebut.

Pada data observasi awal pada tahun 2017 dan 2018 pada beberapa Kabupaten/Kota terjadi peningkatan jumlah unit usaha IKM, hanya saja jumlah tenaga kerja mengalami penurunan. Kondisi lain yang berbeda juga terjadi penurunan jumlah investasi dan penurunan jumlah produksi IKM. Tentunya 2 tahun ini belum dapat dijadikan sebuah kesimpulan bahwa antara investasi dengan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif. Kondisi lain yang juga belum dapat disimpulkan juga terjadi penurunan jumlah investasi dan penurunan jumlah produksi IKM. Sehingga penelitian keterkaitan faktor-faktor penentu perkembangan IKM perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterangan diatas, maka penelitian ini membahas mengenai:

1. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah unit usaha pada industri kecil menengah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap jumlah unit usaha pada industri kecil menengah di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap jumlah unit usaha pada industri kecil menengah di Provinsi Sumatera Barat?
4. Faktor apakah yang lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan industri kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Barat?

TINJAUAN REFERENSI

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Krisis ekonomi yang pernah dialami oleh negara Indonesia pada Tahun 1998, telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian pada saat itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tidak dapat bertahan dari guncangan ekonomi. Beberapa penelitian memunculkan bahwa pada kondisi-kondisi tersebut ternyata industri kecil menengah (IKM) lebih mampu untuk bertahan dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebutlah, pembangunan ekonomi sangat diharapkan untuk lebih memperhatikan perkembangan IKM, bahwa IKM merupakan ujung tombak dari perkembangan perekonomian. Melalui pengembangan IKM yang lebih baik dan terpadu akan dapat mengurangi tingkat pengangguran, memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Industri kecil menengah (IKM) dapat berkembang dengan baik jika dilakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dapat mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro terhadap IKM, kebijakan ini dapat berupa kemudahan dalam berusaha atau keberpihakan dalam penganggaran. Pendapat selama ini yang menganggap bahwa IKM cenderung tidak kompetitif baik dari segi pengelola maupun produksi, diharapkan dengan peningkatan peran pemerintah dapat menjadikan IKM semakin kuat secara manajemen pengelolaan, hasil produksi dan pangsa pasar, baik lokal maupun internasional.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai industri tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2001 mengenai Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas), dengan melakukan:

1. Kebijakan dengan memberikan perbaikan pada kemampuan produksi, peningkatan efisiensi dan kemampuan dalam daya saing pada pasar industri. Kebijakan ini diarahkan pada kemampuan untuk membaca peluang pasar baik lokal dan luar negeri oleh usaha-usaha industri. Dalam pelaksanaannya program ini disebut peningkatan utilitas kapasitas produksi industri.
2. Kebijakan pengembangan usaha kecil menengah, yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan dengan cakupan sebagai berikut:
 - a. Membuat skala prioritas dengan mengutamakan dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan pada UKM – industri dagang yang dalam proses produksinya banyak mempergunakan bahan dasar dari sumber daya alam, sebagai contoh agroindustri, kerajinan, keramik dan gerabah.
 - b. Meningkatkan peran aktif lembaga keuangan atau perbankan dalam menunjang pengembangan usaha kecil menengah dari aspek permodalan.

c.

Seiring dengan terus bergeraknya pembangunan ekonomi nasional, maka peran aktif pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan IKM harus segera direalisasikan. Berbagai kemudahan dalam berusaha, pemberdayaan dan fasilitasi diperlukan dalam mendukung peran IKM dalam pembangunan ekonomi. Menurut Iryandini Lisnawati (2010), diantara peran IKM yakni penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, peluasan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata, ketimpangan antar wilayah yang semakin rendah dan peran seluruh sektor ekonomi dengan lebih merata.

a. Definisi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pengertian IKM menurut Tulus T.H Tambunan (2001) dijelaskan bahwa usaha yang dalam pengelolaannya belum dikelola secara profesional, tidak ada pembagian waktu kerja, tempat yang digunakan pada umumnya merupakan rumah tempat tinggal serta lebih banyak menggunakan anggota rumah sebagai pekerja dalam usaha tersebut. Tetapi usaha-usaha pertanian tidak termasuk dalam definisi ini.

Menurut Wibowo (1994), yang disebut usaha kecil dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak adanya legalitas usaha
2. Hanya satu orang pekerja
3. Menggunakan modal perorangan atau pribadi
4. Pangsa pasar berada disekitar tempat usaha

Perusahaan dengan skala kecil adalah :

1. Maksimal modal yang dimiliki tidak lebih dari delapan puluh juta rupiah.
2. Maksimal modal tidak lebih dari dua ratus juta rupiah untuk perusahaan berjenis produksi dan jasa konstruksi.

Dalam definisi diatas, usaha kecil memiliki banyak peran dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Semakin bertumbuhnya wirausaha baru dalam bentuk usaha-usaha kecil akan mengurangi tingkat pengangguran, semakin meratanya tingkat kesejahteraan dan memberikan stimulasi dalam pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, bahkan pengaruh lebih besarnya pada kondisi ekonomi yang berkeadilan. Dalam mewujudkan peran tersebut sangat diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan usaha kecil ini, serta dengan tetap memberikan berbagai peluang kerjasama dengan usaha-usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Godam (2006) mengkategorikan industri menjadi 3 jenis, yaitu industri yang produksinya tanpa melakukan pengolahan disebut industri primer, industri dengan pengolahan terhadap bahan mentah disebut industri sekunder dan industri yang memberikan jasa sebagai hasil aktivitasnya disebut industri tersier.

Dibandingkan dengan industri besar, ada beberapa keunggulan dari industri kecil menurut Partomo (2002), yaitu:

1. Pada umumnya inovasi dan teknologi yang digunakan lebih simpel
2. Rasa kekeluargaan lebih kental dalam usaha yang dijalankan
3. Membuka lapangan kerja baru dan wirausaha baru
4. Sistem manajemen dan kewirausahaan yang tidak kaku

Konsep dan pengertian dari industri kecil menengah memang cukup beragam. Banyak juga peneliti yang memberikan definisi dari IKM seperti yang telah dijelaskan di atas. Kementrian dan lembaga juga memiliki definisi masing-masing tergantung pada urusan dan kewenangan yang mereka laksanakan. Walaupun ada perbedaan konsep tersebut, tujuannya tetap agar industri kecil menengah sebagai pilar perkembangan perekonomian dapat terus bertumbuh dan berperan aktif dalam perekonomian. Diantara perbedaan tersebut seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih menekankan pada kemampuan usaha dalam menggunakan tenaga kerja dan Kementerian Perindustrian yang lebih melihat pada besarnya investasi pada sebuah usaha.

Dengan memperhatikan jumlah penggunaan tenaga kerja dalam sebuah usaha, Badan Pusat Statistik (2018) membagi industri menjadi industri kecil dan industri menengah. Faktor-faktor lain berupa besaran modal usaha dan jumlah produk yang mampu dihasilkan tidak menjadi fokus bagi BPS dalam mendefinisikan industri. Karena usaha dengan jumlah tenaga kerja sedikit cenderung akan melakukan

kegiatan usaha yang mudah sedangkan usaha yang jumlah tenaga kerjanya banyak makan akan lebih mampu untuk melakukan kegiatan usaha yang besar dengan jumlah hasil produksi lebih banyak.

Berbeda dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang menuangkannya dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 mengenai jenis dari industri dan membedakan industri menurut aset yang dikelolanya tetapi tidak termasuk nilai bangunan dan tanah. Industri yang memiliki aset maksimal 200 juta rupiah merupakan industri kecil sedangkan industri dengan aset 200 juta sampai dengan 5 milyar merupakan industri menengah.

b. Pengertian Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Dalam proses produksi terdapat berbagai kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan, faktor-faktor produksi tersebut dapat berupa modal, tenaga kerja dan teknologi. Masing-masing faktor produksi memperoleh balas jasa, untuk tenaga kerja balas jasa yang diperoleh berupa upah. Sehingga akan ada permintaan dari perusahaan untuk tenaga kerja pada berbagai macam tingkat upah.

Tenaga Kerja

Ada 2 definisi yang dapat menjelaskan mengenai sumber daya manusia (SDM). Pertama, definisi yang memperhatikan besaran keterlibatan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dalam partisipasi atau keikutsertaannya dalam proses produksi. Partisipasi dalam menghasilkan output ini dapat dilihat dari besaran kuantitas dan kualitas output yang diproduksi. Kedua, definisi yang melihat kemampuan dalam kegiatan peningkatan nilai ekonomis dari barang hasil produksi yang dihasilkan. Disini dilihat dari adanya kemampuan seseorang untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aktivitas bekerja ini dilakukan oleh kelompok usia kerja yang dikenal dengan istilah tenaga kerja atau *man power*.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi angkatan kerja atau *labor force* dan bukan angkatan kerja. Golongan bekerja dan golongan yang menganggur serta mencari pekerjaan merupakan angkatan kerja, sedangkan bukan angkatan kerja dapat berupa golongan bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan penerima pendapatan lain-lain.

Mulyani Subri (2003) memiliki definisi yang berbeda. Penduduk yang terlibat dalam proses produksi dengan batasan usia lebih dari 10 tahun merupakan angkatan kerja. Sedangkan yang dapat digolongkan sebagai pengertian bekerja adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dengan jangka waktu minimal 1 jam dalam 7 hari kerja dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan melalui aktivitas yang menghasilkan dan meningkatkan nilai barang dan jasa.

Definisi yang berbeda menurut Badan Pusat Statistik (2003), yang disebut angkatan kerja seperti penduduk dalam usia kerja yang memiliki pekerjaan minimal 7 hari atau sementara sedang tidak bekerja seperti disebabkan sedang menunggu panen, sedang cuti bekerja dan kondisi yang sama lainnya. Kategori lain yang juga merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan mengharapkan pekerjaan disebabkan belum memiliki pekerjaan.

Kesempatan Kerja

Adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia akan dapat membuat perusahaan-perusahaan dapat menyerap tenaga kerja untuk terlibat dalam aktivitasnya. Kondisi ini menurut T.H Tambunan (2001) disebut dengan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja akan seiring dengan peningkatan lapangan kerja baru dan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Kesempatan kerja pada perekonomian dapat diukur secara menyeluruh dan dapat juga untuk masing-masing sektor atau subsektor, dengan menggunakan indikator berupa elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja diukur dengan membandingkan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan produksi ekonomi. Defini menurut Payaman J. Simanjuntak, elastisitas kesempatan kerja dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$E = \frac{\Delta N / N}{\Delta Y / Y}$$

Dimana :

- E : Elastisitas Kesempatan Kerja
 ΔN : jumlah pertambahan kesempatan kerja sektor ekonomi
 N : total kesempatan kerja pada sektor ekonomi
 ΔY : jumlah pertambahan produksi sektor ekonomi
 Y : jumlah produksi sektor ekonomi

Permasalahan dalam kesempatan kerja sering muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara penambahan jumlah penduduk yang akan meningkatkan penambahan jumlah angkatan kerja sementara tidak diiringi dengan perluasan lapangan pekerjaan. Pengaruh lain dari kesempatan kerja yang terkait dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Badan Pusat Statistik menjelaskan kemampuan dari perusahaan atau lembaga atau instansi untuk menyerap atau mempekerjakan tenaga kerja merupakan kesempatan kerja. Diharapkan ada keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan perusahaan untuk kegiatan usahanya. Keseimbangan dalam kesempatan kerja ini membutuhkan ketersediaan akan lapangan pekerjaan. Sehingga lapangan pekerjaan dapat didefinisikan sebagai wadah/tempat/instansi yang dapat difungsikan oleh seorang pekerja untuk bekerja dan melakukan pekerjaan.

c. Investasi

Dalam aktivitas produksi barang dan jasa dilakukan penambahan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga perusahaan perlu melakukan penambahan pengeluaran atau investasi atau penanaman modal dengan melakukan pembelian barang-barang modal, hal ini disebut dengan investasi. Sedangkan dalam makro ekonomi, investasi didefinisikan dengan lebih luas tidak hanya pada batasan individu tetapi pada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian. Melalui peningkatan investasi memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dan pembaruan barang-barang modal dengan kualitas yang lebih baik.

Investasi atau penanaman modal dalam suatu perekonomian sangat penting untuk memberikan stimulasi dalam peningkatan kegiatan ekonomi, memberikan lapangan kerja baru, menggerakkan faktor-faktor pengungkit pendapatan nasional serta peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Investasi dapat dibedakan pada beberapa jenis berupa penanaman modal BUMN, penanaman modal oleh swasta dan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Peran investasi dalam ekonomi ini tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara agregate mempengaruhi permintaan dan pendapatan nasional. Semakin besar investasi dalam perekonomian maka akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga penyerapan tenaga kerja akan lebih meningkat yang artinya kesempatan kerja mengalami peningkatan.

d. Unit Usaha

Definisi dari unit usaha menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan tempat yang jelas lokasi, wilayah dan keberadaannya untuk melaksanakan kegiatan produksi yang dapat dilakukan oleh badan usaha, rumah tangga dan usaha perseorangan. Jadi sebuah unit usaha industri kecil menengah merupakan tempat atau lokasi operasional industri kecil menengah tersebut. Semakin berkembangnya unit usaha industri kecil menengah maka semakin luas lapangan usaha yang memungkinkan untuk penyerapan tenaga kerja. Hubungan ini memiliki tren yang positif, sehingga dapat dikatakan perkembangan unit usaha IKM dapat mengurangi tingkat pengangguran. Karena dengan peningkatan jumlah unit usaha maka permintaan akan tenaga kerja juga akan bertambah.

e. Produksi

Secara sederhana produksi dapat diartikan sebuah kegiatan yang menghasilkan output berupa barang dan jasa dengan pemanfaatan berbagai faktor-faktor produksi. Tetapi lebih luas dapat dijelaskan banyak aktivitas yang lebih kompleks dalam sebuah kegiatan produksi, mulai dari persiapan perencanaan, penyediaan sumber daya produksi yang dapat berupa tenaga kerja, pembiayaan, permodalan, periklanan, pengembangan pangsa pasar dll. Salvatore (2005) juga memberikan definisi produksi sebagai penciptaan barang dan jasa sebagai output dengan pengolahan berbagai input dalam proses tersebut. Definisi lain dari Suparmoko (2010) menjelaskan mengenai fungsi produksi yang didalamnya terdapat hubungan berbagai faktor produksi dan besaran hasil produksi. Adanya perubahan berbagai input (faktor-faktor produksi) menjadi output (barang dan jasa).

Menurut Wibowo dkk (2002) produksi perlu dilakukan pengendalian, dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Mencari berbagai informasi mengenai selera pasar, jenis produk yang sedang dibutuhkan masyarakat, kualitas dan kuantitas barang yang akan diproduksi.
2. Kepastian penyediaan bahan baku industri, sehingga kelancaran proses produksi dapat terus terjaga dan tidak terkendala kekurangan bahan baku.
3. Proses produksi yang terkendali, untuk ini dibutuhkan perencanaan produksi yang matang sehingga waktu, jumlah dan mutu dapat berjalan sesuaikan dengan yang diharapkan.
4. Pemeliharaan terhadap peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam produksi baik peralatan inti produksi dan peralatan penunjang lainnya.
5. Kontrol terhadap kualitas produksi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar.
6. Pengembangan berbasis penelitian juga diperlukan, sehingga metode yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada saat ini dan mutu barang dapat bersaing dengan barang yang dihasilkan pesaing.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Sub sektor industri pengolahan di Provinsi Sumatera Barat memiliki trend meningkat dalam pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dalam pembentukan PDRB. Dilain pihak peningkatan kontribusi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan industri dalam bahasan ini industri kecil dan menengah. Perkembangan industri kecil dan menengah ini akan dipengaruhi oleh nilai investasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi.

Hanya saja pada beberapa kab/kota di Provinsi Sumatera Barat teradapat laju pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan, bahkan ada yang negatif. Berdasarkan kajian Pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen adalah nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi, serta jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebagai variabel dependen.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan menggunakan data time series 5 (lima) tahun dan cross section sebanyak 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga menghasilkan 95 (sembilan puluh lima) observasi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan memperhatikan data-data berupa angka-angka dalam analisisnya. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis linear berganda dengan menggunakan data panel. Adapun persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_i \dots \dots \dots 1)$$

Keterangan:

Y	: Jumlah unit usaha industri kecil menengah
X ₁	: Nilai investasi
X ₂	: Jumlah tenaga kerja
X ₃	: Jumlah produksi
β ₀	: Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃	: Koefisien Regresi
μ _i	: error term
i	: cross section
t	: time series

Persamaan diatas untuk melihat hubungan perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Metode estimasi yang akan dilakukan dengan data panel tersebut menggunakan pendekatan common effect, random effect atau fixed effect tergantung persamaan mana yang terbaik.

- *Common effect* merupakan persamaan regresi paling sederhana dengan menggunakan data time series dan cross section dengan tidak melihat perbedaan antar waktu dan individu, diestimasi dengan *ordinary least square* (OLS)
- *Fixed effect*, persamaan dengan asumsi intersep berbeda antar individu dengan slope yang sama. Persamaan ini sering disebut dengan teknis *least square dummy variabels* (LSDV)
- *Random effect*, akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini perbedaan intersep diamodir oleh error terms, persamaan ini dikenal juga dengan *Errors Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk menentukan model yang akan digunakan, dilakukan beberapa pengujian, yaitu

Uji Chow

Merupakan pengujian untuk menentukan akan memilih *common effect model* (CEM) atau *random fixed effect model* (FEM), dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : model CEM lebih baik (Prob > 0,05)

H₁ : model FEM lebih baik (Prob < 0,05)

Uji Husman

Merupakan pengujian untuk menentukan akan memilih *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM), dengan hipotesa sebagai berikut:

H₀ : model REM lebih baik (Prob > 0,05)

H₁ : model FEM lebih baik (Prob < 0,05)

Uji Langrange

Merupakan pengujian untuk memutuskan menggunakan model *common effect* (CEM) atau *random effect model* (REM), dengan hipotesa:

H₀ : Model CEM lebih baik (Prob > 0,05)

H₁ : Model REM lebih baik (Prob < 0,05)

Deteksi Asumsi Klasik

Model diatas harus memenuhi asumsi klasik regresi untuk melihat hubungan yang signifikan dan refrensif, sehingga dapat dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Analisis Regresi

a. Koefisien Determinasi (R²)

Kebaikan model yang telah digunakan dapat diketahui dari model koefisien determinasi (*adjusted R²*) yaitu dengan menunjukkan besarnya daya menerangkan dari variabel independen terhadap variabel dependen pada model tersebut. Nilai R₂ berkisar antara 0 hingga 1. Semakin nilai R₂ mendekati 1, maka model regresi semakin baik.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk menunjukkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut (Stock dan Watson, 2008) :

H₀ : $\beta_{1,2,3} = 0$ berarti tidak ada variabel independen yang dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

H_i : tidak semua koefisien regresi bernilai nol, berarti ada variabel independen yang dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Kriteria uji F adalah sebagai berikut :

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, digunakanlah nilai t hitung yang diperoleh melalui persamaan sebagai berikut (Gujarati, 2009): 70

Perumusan hipotesis pada uji-t untuk variabel nilai investasi (X_1), jumlah tenaga kerja (X_2) dan jumlah produksi (X_3) sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_i < 0$; ($i = 1, 2, 3$) berarti variabel nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi secara individual tidak berpengaruh terhadap jumlah unit usaha IKM.
- $H_1 : \beta_i > 0$; ($i = 1, 2, 3$) berarti variabel nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi secara individual berpengaruh positif terhadap jumlah unit usaha IKM.

Kriteria pengujian uji t untuk variabel X_1 , X_2 dan X_3 adalah sebagai berikut :

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk variabel X_1 , X_2 dan X_3 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa berarti variabel nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi secara individual tidak berpengaruh terhadap jumlah unit usaha IKM di Provinsi Sumatera Barat.
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk variabel X_1 , X_2 dan X_3 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi secara individual berpengaruh positif terhadap jumlah unit usaha IKM di Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN ANALISIS

Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai cross section F dengan probabilitasnya $0,7099 > 0,05$, maka H_0 diterima, untuk sementara pendekatan yang dipakai adalah Common Effect Model (CEM).

Hasil Uji Hausman

Hasil olahan data diperoleh nilai probabilitasnya $0,7689 > 0,05$, maka H_0 diterima untuk sementara pendekatan yang dipakai adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Langrange

Uji ini dilihat dari hasil olahan dengan memperhatikan nilai dari Breusch-Pagan dengan probabilitasnya $0,4017 > 0,05$, maka dapat diputuskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk melihat model regresi dikategorikan berdistribusi normal dengan memperhatikan distribusi normal melihat hasil uji normalitas pada *Eviews* memperhatikan nilai Jarque-Bera dengan probabilitasnya $0,251883 > 0,05$ artinya residual berdistribusi normal

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dideteksi dengan memperhatikan uji Durbin Watson, bahwa dapat dikatakan tidak ada autokorelasi apabila nilai Durbin Watson terletak antara dua sampai dengan (4-du). Dari hasil olah data dengan $n = 95$, jumlah variabel bebas $k = 3$ diperoleh nilai $du = 1,7316$ diperoleh $1,7316 < 1,874 < 2,2684$, bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai residual masing-masing variabel $< 0,8$ data bebas dari gejala multikolinearitas. Dari tabel analisis diperoleh nilai 0,475895, 0,606204 dan 0,554326 $< 0,8$. Artinya dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel independen X1, X2 dan X3.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan menggunakan Uji Gletser, dengan hasil probabilitasnya 0,1352, 0,4663 dan 0,1372 $> 0,05$ yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Analisis Hasil Regresi

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/22/20 Time: 20:29

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 95

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.5341	152.4650	0.711863	0.4784
X1	0.283571	0.034470	8.226616	0.0000
X2	0.000427	0.000512	0.834477	0.4062
X3	0.139118	0.000178	2.386679	0.0001
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			741.4591	1.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	710.1267	R-squared		0.889616
Mean dependent var	1293.063	Adjusted R-squared		0.872791
S.D. dependent var	999.2758	S.E. of regression		725.5660
Sum squared resid	47906589	F-statistic		29.09910
Durbin-Watson stat	1.259964	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.489616	Mean dependent var		1293.063
Sum squared resid	47906589	Durbin-Watson stat		1.259964

Sumber: Eviews 11, Data Diolah

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. $R^2 = 0,88$ mendekati 1, maka hubungan antar variabel dalam persamaan regresi semakin baik.

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Hasil pengujian diatas memperlihatkan uji t masing-masing variabel, maka kesimpulannya bahwa jumlah tenaga kerja dengan t hitung 8,226616 dengan tingkat probabilitas $0,0000 < 0,05$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah unit usaha IKM di Provinsi Sumatera Barat. Nilai investasi dengan t hitung 0,834477 dengan tingkat probabilitas $0,4062 > 0,05$ maka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah unit usaha IKM dan nilai produksi dengan t hitung 2,386679 pada probabilitas $0,0001 < 0,05$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah unit usaha IKM di Sumatera Barat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai F hitung 299,09 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel independent jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen jumlah unit usaha IKM.

Adapun persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 108,5341 + 0,283571 X_1 + 0,000427 X_2 + 0,139118 X_3$$

Hasil regresi dan persamaan di atas dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kerja Industri Kecil Menengah (IKM)

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018.

2. Nilai investasi Industri Kecil Menengah (IKM)

Dari hasil estimasi data panel diperoleh hasil bahwa nilai investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM di Sumatera Barat tahun 2014-2018. Kondisi ini merujuk bahwa penambahan investasi untuk barang-barang modal dan peningkatan teknologi tidak mengharuskan penambahan unit usaha baru. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Zelly (2017) yang memperoleh hasil bahwa penambahan modal pada industri kecil makanan di Sumatera Barat berpengaruh terhadap perkembangan IKM di Kota Payakumbuh Sumatera Barat

3. Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM)

Hasil estimasi data panel didapatkan hasil bahwa nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan jumlah unit usaha IKM di Sumatera Barat tahun 2014-2018.

KESIMPULAN

Hasil analisa dan pembahasan di atas serta dukungan hasil penelitian lainnya, dapat disimpulkan bahwa : 1) Jumlah tenaga kerja pada IKM di Sumatera Barat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah unit usaha IKM, kondisi ini menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja pada sektor IKM akan mendorong penambahan unit usaha IKM tersebut. Kondisi sebaliknya juga mungkin terjadi, apabila ada pengurangan tenaga kerja IKM maka unit usaha juga akan dikurangi. 2) Nilai investasi pada IKM terhadap jumlah unit usaha IKM di Sumatera Barat berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sehingga apabila nilai investasi bertambah maka tidak akan menambah jumlah unit usaha hal ini dimungkinkan karena lebih dilakukan pada penambahan investasi berupa teknologi dan peralatan saja. 3) Pengaruh nilai produksi terhadap jumlah unit usaha IKM di Sumatera Barat adalah berpengaruh positif dan signifikan, semakin meningkat nilai dari produksi IKM maka akan mendorong penambahan unit usaha IKM, juga berpengaruh sebaliknya apabila ada pengurangan nilai produksi maka akan mengurangi jumlah unit usaha IKM sebagai usaha menekan biaya produksi.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan : 1) Dalam industri kecil menengah di Sumatera Barat, sangat disarankan untuk pengembangan IKM yang padat karya karena akan meningkatkan jumlah tenaga kerja pada IKM. Dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja lebih baik ini maka jumlah unit usaha IKM juga akan meningkat, sehingga akan dapat menambah

lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran sehingga kontribusi sektor industri pada PDRB Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat. 2) Pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah juga perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kualitas produk, inovasi dan perluasan *market share* dari produk IKM tersebut, karena akan berpengaruh pada peningkatan nilai produksi IKM sehingga IKM dapat terus berkembang tidak hanya kualitas dan kuantitasnya. 3) Kemudahan dalam berusaha, legalitas usaha dan akses permodalan merupakan penunjang dalam pengembangan IKM di Provinsi Sumatera Barat karena itu dibutuhkan kerjasama Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan. 4) Walaupun nilai investasi tidak berpengaruh pada perkembangan jumlah unit usaha IKM, pemerintah tetap harus memperhatikan teknologi yang dipakai oleh IKM untuk dapat meningkatkan daya saing IKM dalam pasar global.

KEPUSTAKAAN

- [1] A. Harits Nu'man, "Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas". Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM: Jurnal Penelitian, Volume XXI, No. 3 Juli-September 2005: 3008-415, 2005
- [2] Adrimas, "Perkembangan Industri Kecil di Kota Payakumbuh," Suatu Studi Mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah: Laporan Penelitian, 2011.
- [3] Astri Dwi Widyastuti, "Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011," Semarang: 2013
- [4] Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, "Sumatera Barat Dalam Angka 2014 hingga 2018: Padang, 2003.
- [5] Dominick. Salvatore, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Erlangga, 2005.
- [6] Etty Puji Lestari, "Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah melalui Platform Klaster Industri," Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, 2010.
- [7] Fachry Noviar Singka, Nurmala K Panjaitan, Tjahja Muhandiri, "Usaha dan Pengembangan Industri Kecil Berbasis Komunitas Lokal," Jurnal IPB Volume 9 No. 2, Bogor, 2014.
- [8] Godam, "Pengertian, Definisi, Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia," Perekonomian Bisnis, 2006.
- [9] Gujarati & Porter, Basic Econometric (5th Edition). New York: McGraw Hill, 2009.
- [10] Habibullah, Muzafar Shah, Radam, Alias, "Industry Concentration in Rich and Poor States in Malaysia," ICAFI Journal of Industrial Economics, 2009.
- [11] Kirwani SE, MM, "Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo," Surabaya, 2012.
- [12] Mankiw. G, Makroekonomi (6th Edition). Jakarta : Erlangga, 2006.
- [13] Partomo dkk, "ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi," Galia Indonesia: Bogor. 2002.
- [14] Payaman J. simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: FE UI, 2002.

- [15] Todaro. MP dan Smith. SC, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga, 2014.
- [16] Tambunan Tulus, "Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia." Jakarta: PT. Mutiara Sumber, 2011.
- [17] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- [18] Widiastuti R, Awang SA, Prayitno,"Kajian Stratejik Kelola Usaha pada Idustri Kecil AGEL," *Jurnal Riset Industri*, Vol. V, No. 1, Yogyakarta: 2011.